

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan merupakan salah satu tonggak deregulasi bisnis di Indonesia. Dengan adanya pesawat udara dapat memudahkan penumpang untuk berpindah dari satu daerah ke daerah lainnya dengan jangka waktu yang singkat dan efisien. Di dalam penyelenggaraannya ternyata banyak keluhan dan aduan yang disampaikan oleh penumpang terhadap maskapai penerbangan di karenakan terjadinya berbagai masalah. Untuk itu perlu adanya pengaturan perlindungan hukum untuk menentukan tanggung jawab maskapai penerbangan sehingga kepentingan penumpang dapat terlindungi

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen transportasi niaga pesawat udara, serta bagaimanakah tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap penumpang yang di rugikan akibat kelalaian maskapai penerbangan.

Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perlindungan hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami keterlambatan transportasi niaga pesawat udara serta tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap penumpang yang merasa dirugikan telah di aturdi dalam Undang-Undang Nomor 89 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Peraturan-peraturan tersebut di buat dengan tujuan agar penumpang mendapatkan keselamatan dan keamanan dalam menjalankan penerbangan, serta agar penumpang lebih mandiri dan mengetahui arti penting dari di terbitkannya undang-undang tersebut.

Kata kunci : Perlindungan Hukum,Konsumen,Transportasi Niaga

ABSTRACT

Act No. 15 of 1992 about the flight is one of the milestone deregulation of business in Indonesia. With the presence of an aircraft can make it easier for passengers to move from one area to another with short periods of time and efficiently. In the first turns out to be a lot of complaints and the complaint submitted by passengers against airline because of occurrence of various problem. For it is need for legal protection settings to determine the responsibility of the airline so that the interests of the passengers can be protected.

Issues raised in the study is how the settings of legal protection of the consumer of the commercial transport aircraft, as well as how the responsibility of airlines towards passengers in shallot trade disadvantaged due to the airline's negligence.

This research was conducted legally normative that is by performing a search against existing legislation related to the protection of the law. Data analysis was done qualitatively.

The result of this reaserch show that the arrangements regarding the legal protection of consumers who experienced a delay in transport commercial aircraft as well as the responsibility of airlines towards passengers who feel aggrieved to have been set in Act No. 89 by 2015 and Act No. 8 of 1999.

The regulations made by the goal of keeping the passengers get the safety and securiy of the flight, as well as in the exercise so that passengers are more self-sufficient and aware of the significance issuance in the legislation.

Keyword : Legal protection, consumer, comercial transportation